BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Walaupun istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru karena sudah ada seiring dengan Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi daerah saat ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini berkonsekuensi pada perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan. Pola pertanggungjawaban horizontal *(horizontal accountability)* kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(Hendri Edison , 2009)

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bastian (2006:2) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konsep otonomi daerah maka diperlukan adalah ; pemberdayaan masyarakat, demokratisasi dalam arti pemberian tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, peluang untuk mempercepat perolehan kesejahteraan masyarakat secara merata, peningkatan mutu layanan birokrasi, peningkatan mutu pengawasan melalui legislatif. (Hendri Edison, 2009)

Akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah ini dapat menimbulkan masalah baru bagi pemerintah pusat terkait dengan adanya perbedaan persiapan daerah. Adi (2006) menunjukkan paling tidak terdapat dua hal penting yang menyebabkan perbedaan ini, yaitu pertama adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dan kedua adanya perbedaan kemampuan manajerial dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana. (Hendri Edison, 2009)

Pengendalian dan perencanaan juga berperan dalam keberhasilan otonomi daerah, Yuwono dkk, (2005:4) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu aspek manajemen yang berperan dalam pengendalian seluruh aktivitas organisasi agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan secara sistematis. Keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah sangat bergantung pada kemampuan membiayai kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam wewenang. Daerah yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang besar akan

memperoleh pendapatan yang relatif besar dibandingkan dengan daerah yang tidak mempunyai SDA. (Hendri Edison, 2009)

Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. (M.Hendriar K Hs)

Pemberian tanggungjawab diikuti dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, selain itu pemerintah juga diharapkan agar dapat lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sehingga bisa membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya. (Budi S. Purnomo, 2009).

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Adapun struktur belanja berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. (Budi S. Purnomo, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan, Jatim, tahun anggaran 2012 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 43,2

miliar. Sebab, pendapatan diperkirakan sebesar Rp 1,32 triliun. Sedangkan, belanja daerah mencapai Rp 1,36 triliun. Bupati Lamongan Fadeli menyampaikan pendapatan daerah tahun anggaran 2012 nilai komposisinya terdiri atas beberapa komponen, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 108 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 990 miliar, dan lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 226 miliar. Sedangkan, belanja daerah tahun anggaran 2012 diproyeksikan sebesar Rp 1,36 triliun. Perinciannya, terdiri atas komponen belanja tidak langsung Rp 932 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 436 miliar.(Yakub, 2001)

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung selama sepuluh tahun terakhir, dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Pendapatan	Belanja	%
2001	Rp 761,202,462,406.54	Rp 562,268,168,632.57	74
2002	Rp 843,811,909,467.07	Rp 646,590,348,280.00	77
2003	Rp 961,568,767,562.50	Rp 945,824,122,537.58	98
2004	Rp 1,118,761,646,228.75	Rp 975,023,708,152.70	87
2005	Rp 1,123,097,156,370.00	Rp 1,096,592,281,568.00	98
2006	Rp 1,397,711,614,415.87	Rp 1,266,047,202,038.00	91
2007	Rp 1,685,638,878,892.93	Rp 1,552,886,614,168.00	92
2008	Rp 2,018,841,349,189.30	Rp 2,058,920,582,037.55	102
2009	Rp 2,402,466,979,725.00	Rp 2,240,739,995,151.00	93
2010	Rp 2,440,160,360,714.00	Rp 2,522,680,816,553.00	103

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Menurut Sugianto (2007) "Dalam menyusun APBD, diupayakan agar belanja tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan". Tetapi dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2001, 2002 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, pemerintahan kota Bandung mengalami surplus, sedangkan tahun 2008 dan 2010 mengalami defisit. Padahal. Dapat dilihat bahwa realisasi belanja kota Bandung tahun 2008 dan 2010 mengalami defisit sebesar 2% dan 3% dikarenakan pendapatan pada tahun 2008 dan 2010 lebih kecil daripada belanja daerah pada tahun 2008 dan 2010.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan Tugas Pembantu. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah adalah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan kebijakan fiskal. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintahaan antara Pusat dengan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Salah satu dari Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Budi S. Purnomo, 2009).

Dalam menggunakan dana perimbangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dimana dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pemerintah daerah harus menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat sering dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah. (Budi S. Purnomo, 2009).

Dana perimbangan harus sejalan dengan urusan yang didesentralisasikan, oleh karenanya belanja transfer daerah harus lebih besar, 50 persen dari belanja

Negara," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Seknas (FITRA) Yuna Farhan dalam kegiatan Konsultasi Publik Kebijakan Perimbangan Pusat-Daerah yang Transparan dan Berkeadilan di Jakarta, Selasa (29/11).Yuna Farhan mengatakan FITRA telah melakukan penelitian terhadap persoalan dana perimbangan pusat dan daerah pada 2011 di sejumlah daerah. Diantaranya, di Samarinda, Musi Banyuasin, Provinsi Jawa Tengah, dan Aceh. Ditegaskan, persoalan perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu menjadi salah satu perhatian dalam revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selama ini pemerintah mengklaim bahwa 60 persen belanja Negara direalisasikan di daerah. Mestinya dana itu dialihkan saja menjadi dana transfer untuk daerah. Belum optimalnya pengelolaan perimbangan keuangan pusat dan daerah, baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH), kata Yuna Farhan, juga disebabkan oleh berkembangnya jenis dana perimbangan di luar aturan UU yang berpotensi merusak sistem dana perimbangan. Salah satu jenis dana perimbangan yang masih hangat di benak masyarakat adalah kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah yang sarat dengan kepentingan politik dan membuka ruang praktik mafia anggaran. Dia menambahkan dana perimbangan harus dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang optimal(Yuna Farhan, 2011)

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Realisasi Bagi Hasil Pemerintah Kota Bandung selama sepuluh tahun

terakhir, dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Anggaran Dana Bagi Hasil dan Realisasi Dana Bagi Hasil

Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Anggaran DBH	Realisasi DBH	%
2001	Rp 113,164,552,000.00	Rp 130,370,009,264.47	115.20
2002	Rp 130,279,209,456.00	Rp 137,744,617,855.00	105.73
2003	Rp 285,709,717,616.96	Rp 288,405,650,700.25	100.94
2004	Rp 434,500,000,000.00	Rp 439,689,469,000.00	101.19
2005	Rp 376,153,202,339.00	Rp 403,478,818,511.00	107.26
2006	Rp 421,433,798,000.00	Rp 492,661,819,397.00	116.90
2007	Rp 218,823,169,675.00	Rp 256,390,017,311.00	117.17
2008	Rp 317,013,175,184.00	Rp 386,775,501,155.00	122.01
2009	Rp 335,664,569,489.00	Rp 414,020,100,100.00	123.34
2010	Rp 511,413,619,031.00	Rp 495,157,460,313.00	96.82

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Menurut Mardiasmo(2002) “konsep *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public”. Tetapi dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil dari tahun ke tahun meningkat dan Dana Bagi Hasil yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang

kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2010 menandakan tidak efektifnya dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan asas desentralisasi salah satu sumber utama untuk daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah

dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.(Budi S.Purnomo,2009)

Penerimaan dari PAD Aceh Timur pada 2010 direncanakan Rp 46,780 miliar lebih dengan realisasi Rp 8,544 miliar lebih atau 18,27 persen. Sedangkan penerimaan pajak daerah dari direncanakan Rp 3,017 miliar lebih, terealisasi Rp 2,279 miliar lebih (75,54 persen). Retribusi daerah dari direncanakan Rp 3,552 miliar lebih terealisasi Rp 2,669 miliar lebih (75,16 persen). Munzar melanjutkan, Penerimaan daerah Aceh secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam hal ini berarti penerimaan daerah Aceh masih kurang efektif.(Munzar,2010)

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama sepuluh tahun terakhir, dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	%
2001	Rp 126,782,348,151.29	Rp 123,984,485,749.23	97.79
2002	Rp 197,699,717,568.00	Rp 182,064,238,544.02	92.09
2003	Rp 229,749,164,455.00	Rp 213,029,461,862.25	92.72
2004	Rp 215,114,010,650.00	Rp 222,909,941,952.75	103.62
2005	Rp 213,100,251,482.00	Rp 225,596,438,613.00	105.86
2006	Rp 238,305,532,000.00	Rp 253,882,919,542.87	106.54
2007	Rp 281,981,582,738.93	Rp 287,249,534,044.93	101.87
2008	Rp 338,376,369,006.00	Rp 314,627,155,412.30	92.98
2009	Rp 369,137,442,213.08	Rp 360,152,627,960.00	97.57
2010	Rp 416,030,066,849.00	Rp 441,863,068,294.00	106.21

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Menurut mardiasmo (2002) "konsep *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public". Tetapi dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat. Dan Pendapatan Asli Daerah yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan2010. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003, 2008 dan 2009 menandakan tidak efektifnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaruh PAD dan DBH terhadap Belanja Daerah diantaranya yang dikemukakan oleh Indra Syahputra (2010) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh PAD, DBH, dan DAU terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD). Rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) 6.85% dan rata-rata kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) 70.88%. Ketimpangan tersebut memberikan kesimpulan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sisi *revenue assignment* masih terlalu .sentralistis..

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **" Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003, 2008 dan 2009.
2. Dana Bagi Hasil yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2010.
3. Realisasi belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang menyebabkan defisit yaitu pada tahun 2008 dan 2010.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik secara simultan maupun parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan untuk menjawab masalah-masalah tertentu yang ada kaitannya dengan Belanja Daerah

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik secara simultan maupun parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada dinas pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagi dinas yang diteliti, diharapkan akan memberikan informasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah sehingga bisa digunakan dalam mengamati peningkatan serta penurunan Belanja Daerah yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
2. Bagi pegawai pemerintah yang diteliti, diharapkan memberikan informasi tentang sejauh mana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

2 Bagi Instansi

   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukancana No. 2 Telp. 4230393.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan September 2011 sampai dengan Febuari 2012

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Sept 2011	Okt 2011	Nov 2011	Des 2011	Jan 2012	Feb 2012	Mar 2011
I	**Tahap Persiapan :**							
	1.Membuat outline dan proposal UP	■						
	2.Mangambil formulir penyusunan skripsi	■						
	3.Menentukan tempat penelitian	■	■					
	4. Sidang Komprehensif			■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**							
	1. Bimbingan UP		■	■				
	2. Pendaftaran Seminar UP				■			
	3. Seminar UP				■			
	4. Revisi UP				■			
	5.Membuat outline dan proposal Skripsi					■		
	6. Penelitian Perusahaan		■	■	■	■		
	7. Penyusunan skripsi				■	■		
	8. Bimbingan skripsi					■	■	
III	**Tahap Pelaporan :**							
	1.Menyiapkan draft skripsi						■	
	2. Sidang akhir skripsi						■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						■	